

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	3
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

Legislator Kecewa ITF Sunter Batal Dibangun

Penjaringan, Warta Kota

Komisi C DPRD DKI Jakarta mempertanyakan keputusan Pemerintah DKI Jakarta yang mendadak membatalkan pembangunan Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter, Jakarta Utara pada 2023. Padahal proyek itu sudah digagas sejak lama dan masuk dalam proyek strategis nasional (PSN) pemerintahan Presiden RI Jokowi.

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Manuara Siahaan mengaku kecewa dengan keputusan pemerintah daerah tersebut. Politisi PDIP ini juga mempertanyakan dasar Pemerintah DKI yang membatalkan rencana tersebut.

"Persoalannya sekarang ITF ini apakah evaluasi itu sudah dilakukan apa belum? Tiba-tiba meledak statement (pernyataan) gitu loh (ITF tak dilanjutkan) karena alasan A, B, C, D, E," kata Manuara usai rapat kerja dengan Dinas LH DKI Jakarta di DPRD DKI Jakarta pada Selasa (1/8/2023).

Manuara mengatakan, dewan mendukung proyek ini karena dapat menanggulangi persoalan sampah di Jakarta. Selain itu, rencana itu sudah dibuatkan Peraturan

Daerah (Perda) dan masuk dalam PSN, serta anggarannya sudah disiapkan.

"Siapa yang bertanggung jawab terhadap objektivitas rasionalitas argumentasi itu? Ya dinas teknis maka saya kejar itu, saya katakan apa masukan yang kau (Dinas LH DKI Jakarta) kasih ke Pj Gubernur," ujar Manuara.

"Jangan kau kasih pil pahit tapi ujungnya jadi sakit perut gitu loh, yang kau kasih obat atau racun nah besok minggu depan akan mereka jawab," sambung Manuara.

Dalam rapat tersebut terungkap, bahwa proyek ITF Sunter belum dibangun karena DKI khawatir tak sanggup membayar biaya tipping fee kepada mitra pengelola ITF.

Berdasarkan hasil feasibility study (FS), pemerintah daerah harus membayar tipping fee sebesar Rp 500.000-Rp 700.000 per ton dari sampah yang diolah selama 20-30 tahun.

Permasalahan Tipping Fee

Sementara itu Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Sarjoko mengatakan, ada beberapa pertimbangan untuk menghentikan proyek ini. Alasan

utama terkait kemampuan keuangan daerah, sehingga penyelenggaraan ITF dikhawatirkan membebani anggaran daerah.

"Tipping fee ini dengan mempertimbangkan kemampuan skala APBD DKI yang sekarang ini trennya akan menurun, dikhawatirkan dikemudian hari akan membebani. Oleh karena itu, kami mengambil sebuah langkah yang memang lebih proper untuk kondisi saat ini," kata Sarjoko di DPRD DKI Jakarta pada Selasa (1/8/2023).

Meski demikian, kata Sarjoko, pihaknya telah mengembangkan pengolahan sampah berbahan batubara seperti Refused Derived Fuel (RDF) di TPST Bantargebang, Kota Bekasi. Dia berharap, keberadaan RDF bisa mengurangi sampah di DKI Jakarta meski diyakini belum bisa dilakukan secara tuntas.

"Tipping fee itu ada kisaran sekitar Rp 500.000-Rp 700.000, itu yang diproposalkan. Nah ini kan apakah ada solusi yang mengurangi kekhawatiran hal-hal yang membawahi APBD, apakah yang tipping fee itu bisa dihilangkan, atau bisa diminimalkan," jelas Sarjoko. **(faf)**